



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Sekretaris Utama BNPB
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 9 September 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Pendalaman Pembahasan RKA K/L TA 2021. 2. Isu – Isu Aktual dan Solusinya.
Ketua Rapat	: H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 49 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 3 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Sestama, Irtama, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Tanggap Darurat, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Deputi Logistik dan Peralatan, Pusdatin dan Humas, dan Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.11 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, dengan didampingi Ketua Komisi VIII H.Yandri Susanto, S.Pt, Wakil Ketua Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua

Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Utama dan para Pejabat Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda “**Pendalaman Pembahasan RKA K/L Tahun 2021**”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima Pagu Anggaran BNPB Tahun 2021 sebesar Rp813.103.749.000,- (*Delapan Ratus Tiga Belas Miliar Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dengan rincian Program Dukungan Manajemen sebesar Rp250.391.077.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dan Program Ketahanan Bencana sebesar Rp562.712.672.000,- (*Lima Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*). Pagu Anggaran BNPB Tahun 2021 berdasarkan unit kerja dan program/kegiatan sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	250.391.077.000
A	Sekretariat Utama	
a	Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama	9.074.668.000
b	Biro Keuangan	83.212.962.000
c	Biro Perencanaan	35.671.615.000
d	Biro Umum dan SDM	89.000.000.000
e	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	23.231.832.000
B	Inspektorat Utama	
a	Inspektorat I	4.500.000.000
b	Inspektorat II	4.500.000.000
c	Inspektorat III	1.200.000.000
II	PROGRAM KETAHANAN BENCANA	562.712.672.000
A	Deputi Bidang Sistem dan Strategi	
1	Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	34.000.000.000
2	Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	9.300.000.000
3	Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana	8.000.000.000

B	Deputi Pencegahan	
1	Direktorat Kesiapsiagaan	33.057.500.000
2	Direktorat Mitigasi	10.000.000.000
3	Direktorat Peringatan Dini	12.400.000.000
C	Deputi Bidang Penanganan Darurat	
1	Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat	7.200.000.000
2	Direktorat Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	14.000.000.000
3	Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat	256.500.000.000
D	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
1	Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik	7.000.000.000
2	Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA	14.043.651.000
3	Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	7.500.000.000
E	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan	
1	Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan	58.636.000.000
2	Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan	16.932.000.000
F	Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan	59.683.521.000
G	Pusat Pengendalian Operasi	14.460.000.000

2. Komisi VIII DPR RI meminta Sekretaris Utama dan para Pejabat Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BNPB agar sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan serta Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Memberikan dukungan yang lebih pada program di bidang pencegahan, baik mitigasi bencana, kesiapsiagaan maupun peringatan dini, agar masyarakat memiliki kapasitas dalam menghadapi bencana.
 - b. Meningkatkan serapan anggaran Tahun 2020 yang sampai awal September 2020 ini baru terserap sekitar 60 persen.
 - c. Mendorong agar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, BNPB memperhatikan efektivitas dan ketercapaian sasaran program baik untuk bencana alam maupun bencana non-alam.
 - d. Meminta BNPB aktif dalam memberikan bantuan test Covid-19 bagi masyarakat yang tidak mampu.
 - e. Menjamin adanya bantuan dari Pemerintah bagi tenaga medis dan tenaga pendukung medis yang meninggal dunia akibat Covid-19.

- f. Memperluas sosialisasi mengenai pentingnya 3M (Menggunakan Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan) dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19.
- g. Memperhatikan keberlanjutan program penanganan bagi masyarakat korban bencana alam seperti korban gempa di Lombok dan Palu.
- h. Melakukan kajian untuk meningkatkan peran BNPB dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- i. Membangun infrastruktur dan suprastruktur penanggulangan bencana sekaligus menyiapkan jaminan asuransi bagi para relawan bencana.
- j. Menetapkan standar dan biaya uji Covid-19 (*PCR/swab test*) dalam waktu dekat dan secara transparan.
- k. Meningkatkan kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tujuan program yang sudah ditetapkan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**



H.M.R. IHSAN YUNUS, ME.Con.,Std